

ABSTRAK

Ilham Syukur: Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu. Di Indonesia, antusiasme terhadap pelaksanaan ibadah haji terus meningkat setiap tahunnya. Kementerian Agama Republik Indonesia memegang peranan penting dalam penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan haji adalah bimbingan manasik haji. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan jamaah agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Bimbingan manasik haji adalah serangkaian kegiatan pendidikan yang diberikan kepada calon jamaah haji untuk mempersiapkan mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Kegiatan ini mencakup pengajaran tentang rukun, wajib, dan sunah haji, tata cara pelaksanaan ibadah, serta adab yang harus dijunjung tinggi. Dalam konteks modern, bimbingan manasik tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga mencakup berbagai aspek praktis yang akan dihadapi jamaah selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi fungsi manajemen dalam pelayanan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi dari Freeman dan Sherwood yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: Identifikasi Kebijakan, Pelaksanaan Program, Evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan narasumber, serta analisis dokumen penting terkait kebijakan dan prosedur pelaksanaan bimbingan manasik haji. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang menjadi pusat penyelenggaraan bimbingan manasik bagi calon jamaah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap identifikasi kebijakan, Kementerian Agama RI Kabupaten Tasikmalaya telah secara tepat menentukan kebutuhan masyarakat akan bimbingan manasik haji berdasarkan landasan hukum yang sudah ada. Pada tahap pelaksanaan program berhasil menerapkan berbagai metode pengajaran yang interaktif, metode ini mencakup ceramah interaktif, sesi tanya jawab, dan praktik simulasi. Namun, meskipun hasil evaluasi menunjukkan banyak aspek positif, ada tantangan yang perlu diatasi yaitu keterlambatan dan ketidakhadiran peserta, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Agama RI Kabupaten Tasikmalaya merumuskan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas program bimbingan manasik haji.

Kata Kunci: Implementasi, Kementerian Agama, Bimbingan Manasik Haji

ABSTRACT

Ilham Syukur: Implementation of Management Functions in Hajj Guidance Services at the Ministry of Religious Affairs Office in Tasikmalaya Regency in 2025.

The Hajj is one of the pillars of Islam and is obligatory for every able-bodied Muslim. In Indonesia, enthusiasm for the Hajj continues to grow each year. The Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia plays a crucial role in organizing the Hajj, from planning to implementation. One crucial aspect of Hajj management is Hajj guidance. This activity aims to prepare pilgrims to perform the Hajj properly. Hajj guidance is a series of educational activities provided to prospective pilgrims to prepare them for the Hajj. These activities include instruction on the pillars, obligatory and recommended Hajj rituals, procedures for performing the ritual, and ethical principles that must be upheld. In the modern context, Hajj guidance focuses not only on ritual aspects but also covers various practical aspects that pilgrims will encounter during the journey and the performance of the ritual.

The purpose of this study is to analyze and describe the process of implementing management functions in Hajj guidance services at the Ministry of Religion Office, Tasikmalaya Regency..

The theory used in this research is Freeman and Sherwood's Implementation Theory, which develops a three-stage public policymaking process: Policy Identification, Program Implementation, and Evaluation. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with key informants, and analysis of key documents related to policies and procedures for implementing Hajj guidance. The research location was the Ministry of Religious Affairs Office in Tasikmalaya Regency, which serves as the central hub for Hajj guidance for prospective pilgrims.

The results of the study indicate that at the policy identification stage, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Tasikmalaya Regency, has accurately identified the community's need for guidance on Hajj rituals based on existing legal frameworks. During the program implementation stage, various interactive teaching methods were successfully implemented, including interactive lectures, question-and-answer sessions, and simulation practices. However, although the evaluation results showed many positive aspects, there were challenges that needed to be addressed, namely delays and absences of participants. Based on these evaluation results, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Tasikmalaya Regency, formulated a follow-up plan to improve the quality of the Hajj ritual guidance program.

Keywords: *Implementation, Ministry of Religious Affairs, Hajj Guidance*